

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini secara umum sistem pengendalian intern telah diterapkan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada walaupun penerapannya belum optimal. Masih terdapat temuan BPK dari audit Laporan Keuangan Tahun 2019 dan 2020 yang menunjukkan bahwa pengendalian intern atas aset tetap masih lemah. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Aktivitas pengendalian adalah kegiatan pengendalian yang dituangkan ada melekat dalam bentuk kebijakan dan prosedur kegiatan yang belum dilakukan secara baik, seperti :
  - a. Review kinerja masih menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan dalam informasi.
  - b. Pengendalian pengelolaan sistem informasi belum dilakukan dengan baik dimana kebijakan disalahgunakan sehingga menyebabkan kecurangan dalam peng-inputan data.
  - c. Pembinaan sumber daya manusia masih kurangnya kompetensi dan bimbingan.
  - d. Pengendalian fisik aset belum dilakukan secara efektif.
  - e. Transaksi yang terjadi diotoritas oleh pihak yang tidak berwenang mengakibatkan salah penginputan data sehingga terjadi ketidakcocokan data dalam sistem dengan keadaan yang sebenarnya.

f. Pencatatan yang akurat dengan tepat waktu belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tanggungjawab dalam pencatatan yang akurat atas transaksi dan kejadian.

Selain itu, tahapan pengelolaan barang milik daerah telah dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Daerah namun, masih mengalami kendala pada tahap pengamanan dan penatausahaan.

2. Informasi dan Komunikasi belum memadai, dimana pemerintah kurang memberikan informasi tentang keberadaan aset tetap. Hal tersebut terlihat dari kurangnya control untuk setiap aset, sehingga aset tetap yang disajikan di dalam laporan keuangan belum menyajikan nilai buku (*book value*) dari aset tersebut.
3. Faktor penghambat Sistem Pengendalian intern pada Pemerintah Kabupaten Ngada adalah kekurangan sumber daya manusia yang bisa menatausahakan aset serta kekurangan sarana teknologi yang mengakibatkan tidak berjalannya sistem pengendalian intern secara baik.
4. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Ngada pada Badan Keuangan Daerah selaku pengelola aset, telah melakukan pelatihan kepada pejabat penatausahaan aset daerah untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya penatausahaan aset tetap, melakukan pendampingan berupa rekonsialisasi dan memperbaiki sistem administrasi untuk penilaian Badan Pemeriksa Keuangan.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka disarankan kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada, untuk memperhatikan sistem pengendalian intern terhadap aset tetap yaitu :

1. Dalam aktivitas pengendalian terutama pada pengelolaan barang milik daerah perlu adanya koordinasi dan pengawasan dalam merencanakan kebutuhan barang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
2. Dalam informasi dan komunikasi perlu dilakukan koordinasi secara rutin sehingga informasi mengenai aset tetap selalu *Up To date*. Manajemen perlu memberikan informasi tentang keberadaan aset tetap, sehingga pencatatan aset tetap yang mendukung laporan keuangan secara lengkap dan terjamin keandalannya serta dilakukan rekonsiliasi secara berkala untuk mengidentifikasi terjadinya kesalahan dalam pencatatan mengenai aset tetap sejak dini.
3. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Ngada harus memperhatikan penempatan staf sesuai dengan mutu serta kemampuan di bidangnya masing-masing sehingga bisa mewujudkan sistem pengendalian intern aset tetap yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta
- Bastian, Indra (2011) "*Sistem Akuntansi Sektor Publik*". Jakarta: Salemba Empat
- Baridwan, Zaki (2004) *Intermediate Accounting "Pengantar Akuntansi"*, Buku 2, Edisi 21. Jakarta: Salemba Empat
- Bintang Santri Br, Panjaitan (2019) *Pengendalian Intern atas Aset Tetap Pada Kantor Pemerintahan Pangulu Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun*. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas HKBP Nommensen. Diakses 15 Maret 2022
- <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/3492>
- Halim, Abdul (2012) "*Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*". Jakarta: Salemba Empat
- Kurniawan, Topan. (2013) *Analisis Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Kabupaten Musi Bayuasin*. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang. Diakses 22 Maret 2022
- <http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&uri=http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1232/1/1>
- Madesen, Karamoy (2018) *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap BMD Pemerintah Kota Bitung*. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi. Diakses 19 April 2022
- <https://doi.org/10.35800/jjs.v9i2.26470>
- Mulyadi. (2001). "*Sistem Akuntansi*". Jakarta: Salemba Empat
- Napitupulu, Jenni (2018) *Pengendalian Intern Aset Tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Medan*. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas HKBP Nommensen. Diakses 26 April 2022
- <http://repository.uhn.ac.id/handel/123456789/1520>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang "*Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*"
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang "*Standar Akuntansi Pemerintah*"

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 7 Tentang “*Akuntansi Aset Tetap*”

Romney, Steinbart (2014) “*Tujuan Pengendalian Intern*”

Sugiyono,(2010) “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*”. Bandung:Alfabeta